

Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Muftihah Rizqah^{1*}, Herman Dema², Barisan³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia muftihahrizqah@gmail.com

* Correspondence : muftihahrizqah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupataten Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimulai dari sebagai pemecah masalah, fasilitator, penghubung system, motivator dan komunikator sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, upaya ini masih belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi anak putus sekolah secara efektif.

Kata kunci : *Peran pemerintah, pemerintah daerah dan anak putus sekolah.*

ABSTRACT

This study aims to find out the role of local governments in handling school dropouts in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. This research is a qualitative research. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include: observation, interviews and documentation. The data obtained from the results of the research were processed using qualitative descriptive data analysis. The results of this study show that the Role of the Regional Government in Handling School Dropouts in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency, which starts as a problem solver, facilitator, system liaison, motivator and communicator, has been running well. However, these efforts are still not fully successful in effectively addressing school dropouts.

Keywords: *The role of the government, local governments and school dropouts.*

Pendahuluan

Pendidikan dipandang sebagai pilar utama pembangunan nasional dan kunci untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Waikero & Iswahyudi, 2019). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menyebabkan evolusi ke arah yang lebih maju, namun juga menimbulkan tantangan sosial baru yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dampaknya adalah adanya kesenjangan antara harapan dan realitas hasil pendidikan, yang secara terus-menerus menghadapi berbagai masalah.

Secara formal pendidikan dilaksanakan dari usia dini sampai perguruan tinggi. Singkatnya, pendidikan adalah sesuatu yang dilakukan sepanjang hidup seseorang, dari bayi hingga dewasa. Pendidikan anak usia dini, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini, secara notabene difokuskan pada pengajaran anak-anak muda yang baik, nilai-nilai normal sehingga mereka dapat mengembangkan kepribadian dan potensi mereka sejalan dengan tahapan perkembangan anak. Menurut PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa sekolah untuk siswa muda adalah jenis pendidikan pra-sekolah yang menawarkan program pendidikan dini untuk anak-anak berusia 4 tahun sampai mereka memasuki pendidikan dasar (Bayu, Saleh, 2023).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menyatakan "Setiap anak berhak atas pendidikan yang mendukung perkembangan pribadinya dan sesuai dengan potensi intelektualnya". Hak ini sejalan dengan hak asasi manusia umumnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diakui melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan '*Convention on the Right of the Child*' (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Definisi anak dalam konteks ini juga mencakup anak yang mengalami putus sekolah (Solechah, 2020).

Masalah mengenai pendidikan anak-anak di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama ketika menyangkut tingkat putus sekolah. Anak putus sekolah dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Sumardi & Alqadri, 2022). Faktor internal meliputi hal-hal seperti kemalasan, minat yang rendah atau hobi bermain yang menghalangi kegiatan belajar anak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi keuangan keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang tidak harmonis, latar belakang pendidikan orang tua dan lingkungan sosial yang mempengaruhi motivasi anak untuk tetap bersekolah (Suryana, 2020). Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan tidak hanya terkait dengan ketertinggalan dalam hasil belajar, tetapi juga tingkat putus sekolah yang cukup tinggi (Abdullah, Rijal, 2020). Di Indonesia, masalah putus sekolah masih belum tertangani meskipun ada program pemerintah. Jumlah anak-anak yang tidak bersekolah tetap ada, bahkan di Sulawesi Selatan, meskipun penerapan pendidikan wajib selama 12 tahun di setiap provinsi di Indonesia.

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun ajaran 2020-2021, terdapat sekitar 83,7 ribu anak yang tidak melanjutkan pendidikan mereka di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencakup anak putus sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sulawesi Selatan masuk dalam rincian 10 provinsi dengan jumlah anak putus sekolah di urutan kelima dengan total 6.107 anak. Kabupaten Sidenreng Rappang ditemukan jumlah anak putus sekolah sebanyak 100 anak dari usia 7-18 tahun. Berdasarkan data aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dalam (Bappelitbangda sidrap,

2022) di Kecamatan Maritengngae menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah sebanyak 33 siswa di jenjang SMA.

Pemerintah adalah pemain utama dalam meningkatkan standar pendidikan bagi siswa Indonesia, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dan fasilitas minimal dalam bentuk gedung sekolah yang sesuai serta berbagai sumber daya lain untuk bantuan akademik. Khususnya di daerah-daerah yang lebih terpencil di Indonesia, sekolah-sekolah yang rusak parah yang belum dibangun kembali sangat jarang terjadi di sekolah-sekolah perkotaan. Dengan kata lain, sekolah-sekolah perkotaan tetap berada di negara bagian ini, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Peran pemerintah adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju masyarakat modern (Asep & Wahidah, 2022). Untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan yang direncanakan dan kemajuan menuju masyarakat modern, suatu negara, Negara, dan pemerintah harus secara sadar bekerja sama. Ini adalah fungsi pemerintah. Peranan pemerintah menurut *Gito Saputro* (Mustanir, 2020), yaitu sebagai Peranan sebagai pemecah masalah (*problem solving*), merujuk pada fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Peran sebagai fasilitator, Peran pemerintah sebagai fasilitator mengacu pada fungsi dan tanggung jawabnya dalam memfasilitasi atau memudahkan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat. Peranan sebagai penghubung sistem, merujuk pada fungsi mereka dalam memfasilitasi koordinasi dan interaksi antara berbagai sistem dalam masyarakat. Peranan sebagai motivator, mencakup upaya untuk mendorong, menggerakkan, dan menginspirasi masyarakat serta berbagai sektor untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Peranan sebagai komunikator, melibatkan kemampuan dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, tujuan, kebijakan, dan pesan kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan efektif.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam menangani anak putus sekolah yang digunakan sebagai acuan pada penelitian kali ini yakni, Mustari & Kasmawati (2022) membahas upaya penanganan anak putus sekolah. Andayani (2021) membahas strategi pemerintah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah dan Wahyudi (2023) membahas tentang peran pemerintah desa dalam mendukung pendidikan anak-anak desa terpencil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang terjadi dimasa yang sekarang ataupun yang akan datang terkait masalah atau fenomena yang diangkat oleh peneliti. Penetapan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan pada penelitian ini yaitu Kepala Upt Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Sebagai Pemecah Masalah (Problem Solving)

Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah daerah telah mengatasi masalah anak putus sekolah dengan menggunakan berbagai taktik dan solusi praktis. Seperti melakukan Pengumpulan dan Analisis Data, tugas pemerintah daerah adalah mengumpulkan informasi rinci tentang jumlah siswa sekolah menengah yang tidak bersekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Siswadi, selaku Kepala UPT SMAN 2 SIDRAP terkait dengan program pendataan ATS di Kecamatan Maritengngae adalah sebagai berikut:

“Pendataan terhadap anak putus sekolah dilakukan oleh tim penanganan anak tidak sekolah yang bekerjasama dengan pihak sekolah, data dikumpulkan kemudian dikirim/diserahkan kepada pihak yang lebih tinggi, setiap bulan agustus data anak putus sekolah akan terus diperbarui/dikirim”. (Hasil wawancara 22 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa proses pendataan yang dilakukan secara teratur oleh tim penanganan anak tidak sekolah dan pihak sekolah bekerjasama, serta data terus diperbarui setiap bulan Agustus, namun belum ada indikasi bahwa program tersebut efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya yang memadai untuk menangani masalah anak putus sekolah atau mungkin kurangnya implementasi program intervensi yang efektif setelah data terkumpul. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian oleh Damaniks (2019) pendekatan dengan memberikan rangsangan dan motivasi kepada masyarakat yang dijadikan sasaran difusi untuk memikirkan problem utama yang mereka hadapi dan diberikan kesempatan untuk memikirkan dan menemukan cara pemecahan terbaik.

2. Peranan Sebagai Fasilitator

Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini memiliki tujuan agar setiap anak mampu bersekolah hingga lulus perguruan tinggi. Selain itu pemerintah juga mengupayakan anak-anak yang terpaksa putus sekolah supaya mengikuti pendidikan alternatif yaitu pada program paket B dan C. Program ini diselenggarakan secara berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga berupaya keras memberikan layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Siswadi, selaku Kepala UPT SMAN 2 SIDRAP terkait dengan program penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Maritengngae adalah sebagai berikut:

“Sebagai fasilitator, pemerintah daerah juga memfasilitasi akses ke beasiswa (KIP) dan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk mengurangi beban finansial yang sering menjadi alasan utama anak putus sekolah”. (Hasil wawancara 22 Mei 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah bertanggung jawab dalam memfasilitasi akses terhadap

beasiswa (KIP) dan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban finansial yang sering menjadi faktor utama penyebab anak-anak putus sekolah. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata, di mana setiap anak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal tanpa harus terhambat oleh masalah finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terlaksana dengan baik. Penelitian di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Hasdinawati & Syamsuddi, (2022) yang memberikan kesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses administrasi masyarakat dalam rangka memenuhi persyaratan urusan pendidikan.

3. Peranan Sebagai Penghubung Sistem

Monitoring dan pendampingan dalam mendukung program percepatan penanganan anak tidak sekolah telah berlangsung di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kegiatan dilaksanakan Pemprov Sulsel bekerjasama Pemkab Sidrap dan Unicef, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel No 71 tahun 2020. Melalui Peraturan Gubernur No. 71 tahun 2020 yang ditindak lanjuti dengan melaksanakan implementasi dan intervensi di 12 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sudarta, selaku Kepala UPT SMKN 1 SIDRAP adalah sebagai berikut:

"Koordinasi dalam pelaksanaan program dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dari tingkat paling lokal di desa hingga tingkat nasional. Mekanisme koordinasi ini didasarkan pada pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang kemudian dilaporkan kepada kepala daerah oleh tim khusus yang menangani masalah anak putus sekolah."
(Hasil wawancara 20 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu aspek kunci dari mekanisme ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan, kendala yang muncul, serta potensi perbaikan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program.

Pemantauan yang rutin dilakukan memungkinkan tim pelaksana untuk menyesuaikan strategi dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan kepada kepala daerah atau instansi yang bertanggung jawab, sehingga mereka dapat terinformasi dengan baik mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah anak putus sekolah. Dengan demikian, pendekatan terkoordinasi dan terpadu ini diharapkan dapat memastikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya penanggulangan masalah anak putus sekolah dari tingkat desa hingga nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai penghubung system dengan hubungan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal penanganan anak putus sekolah sudah terlaksana dengan baik. Penelitian di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustanir (2020) Peran pemerintah sebagai penghubung sistem yaitu, pemerintah desa mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat misalnya dalam hal kegiatan gotong royong.

4. Peranan Sebagai Motivator

Untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat, peran pemerintah daerah dalam menangani anak putus sekolah sangat penting. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini, masih ada berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Pemerintah daerah harus berpartisipasi secara aktif dalam menghentikan anak putus sekolah agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan pendidikan. Salah satu tugas pemerintah adalah mendorong masyarakat untuk lebih menyadari pentingnya pendidikan.

Sejumlah pekerja anak dan anak putus sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang diberikan pelatihan dan motivasi untuk bisa kembali ke sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan pemerintah setempat. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidrap. Pembelajaran dan pemberian motivasi kepada pekerja anak dan anak putus sekolah itu rutin dilaksanakan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Siswadi, selaku Kepala UPT SMAN 2 SIDRAP adalah sebagai berikut:

"...kemudian forum motivasi juga dilakukan kepada orang tua dan anak dengan menjelaskan potensi-potensi yang dapat disebabkan ketika anak putus sekolah serta memberikan motivasi-motivasi". (Hasil wawancara 22 Mei 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa melalui forum ini, anak ataupun orang tua akan diberikan penjelasan mendalam mengenai peluang-peluang yang mungkin terlewatkan, seperti akses terbatas terhadap pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu dan pembatasan dalam pengembangan karir di masa depan. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada orang tua dan anak-anak untuk tetap termotivasi dalam mengejar pendidikan mereka. Dengan memberikan contoh-contoh sukses dan menyoroti potensi-potensi positif dari pendidikan yang terus berlanjut, diharapkan mereka akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai motivator, terutama dalam mengurangi angka putus sekolah sudah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa orang yang belum bisa melakukannya. Penelitian di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menemukan bahwa peran pemerintah daerah sebagai motivator sangat penting. Hal ini seperti studi Wahyudi (2023) bahwa peran Pemerintah Desa sebagai motivator dengan memberikan motivasi kepada orang tua siswa dan anak-anak agar tetap rajin sekolah agar dapat meraih cita-cita.

5. Peranan Sebagai Komunikator

Komunikator adalah pihak-pihak yang menyampaikan pesan kepada seseorang ataupun khalayak luas (Changara dalam Deddy Mulyana, 1998) Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sudarta, selaku Kepala UPT SMKN 1 SIDRAP adalah sebagai berikut:

"Cara terdahulu dengan melakukan identifikasi terkait anak yang telah putus sekolah ataupun terancam putus sekolah kemudian dilakukan pendekatan kepada orang tua siswa untuk berusaha"

agar anak bisa kembali bersekolah ataupun anak tidak putus sekolah. Kemudian diadakan rapat/mengundang stekholder seperti kepala-kepala upt dan pihak yang berwenang untuk menyampaikan tentang begitu pentingnya menangani anak putus sekolah". (Hasil wawancara 20 Mei 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa langkah pertama yang diambil adalah melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang berada dalam situasi ini, baik yang telah secara resmi putus sekolah maupun yang menghadapi risiko serupa. Setelah identifikasi dilakukan, pendekatan dilakukan dengan berkomunikasi langsung kepada orang tua atau wali siswa. Selanjutnya, dilakukan rapat atau undangan kepada para pemangku kepentingan seperti kepala unit pelaksana teknis (upt) dan pihak yang memiliki kewenangan terkait. Rapat ini diadakan untuk menyampaikan pentingnya penanganan masalah anak putus sekolah. Dalam kesempatan ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator utama dalam mengoordinasikan pertemuan, menyediakan platform untuk diskusi dan menggalang dukungan dari semua pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai komunikator pemberi informasi dengan pihak terkait dalam hal penanganan anak putus sekolah sudah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa orang yang belum bisa melakukannya. Penelitian di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang menemukan bahwa peran pemerintah daerah sebagai komunikator sangat penting. Hal ini seperti studi Revia & Max (2018) bahwa peran pemerintah sebagai komunikator pemberi informasi, penerangan, dan sosialisasi sudah berjalan baik, karena pemerintah desa selalu berusaha memaksimalkan semua bentuk atau cara berkomunikasi hal di lakukan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah yang dimulai dari sebagai pemecah masalah, fasilitator, penghubung sistem, motivator dan komunikator sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, upaya ini masih belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi anak putus sekolah secara efektif.

Referensi

- Abdullah, Rijal, P. & R. (2020). Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 19–25. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/dirasah/article/view/2070/1322>
- Andayani, L. D. (2021). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Ats) Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Local Government Strategy In Addressing Dropouts (Ats) In East Kotawaringin District*. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pencerah/article/view/3258/2294>
- Asep, Wahidah, Z. (2022). *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah*. 3(7), 7101–7108.
- Bappelitbangda sidrap. (2022). *percepatan penanganan anak tidak sekolah*. <https://ppid.sidrapkab.go.id/index.php/informasi/download/231>

- Bayu, Saleh, H. D. (2023). *Peran pemerintah kabupaten lombok timur dalam perlindungan anak di bidang pendidikan*. 5(November).
<https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/download/274/178/1048>
- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(2), 171–186.
<https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i2.1346>
- Hasdinawati, Syamsuddin, S. (2022). Program Studi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(01), 11–21. Hasdinawati., & %0ASyamsuddin (2022)
- Mustanir, A. (2020). *Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang*. 1(2), 84–108.
<https://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/download/8/8>
- Mustari, Andi Kasmawati, R. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(September), 210–217.
- Revia, Max, E. (2018). Peran Pemerintah Sebagai Komunikator Pembangunan Di Desa Manembo Kecamatan Langowan Selatan. *Acta Diurna*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/19568>
- Solechah, S. (2020). *Penanganan Anak Putus Sekolah Prespektif Pekerjaan Sosial* (Viana (ed.); Issue July). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58470/1/Penanganan Anak Putus Sekolah Perpspektif Pekerjaan Sosial.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58470/1/Penanganan%20Anak%20Putus%20Sekolah%20Perpspektif%20Pekerjaan%20Sosial.pdf)
- Sumardi, L., & Alqadri, B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7, 786–793.
<http://www.jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/645/386>
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Wahyudi, M. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pendidikan Anak-Anak Desa Terpencil. *Jurnal Borneo Humaniora*, 87–95.
http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneo_humaniora/article/download/4926/2725
- Waikero, S., & Iswahyudi, D. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3(2000), 256–263. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>